

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP ISLAM BRAWIJAYA PUNGGING MOJOKERTO

Muhammad Ainur Rofik (Manajemen Pendidikan Islam)

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto

Rovikababel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMPI Brawijaya Pungging Mojokerto. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisa data dan wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMPI Brawijaya Pungging sudah berjalan sangat baik, mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan yang dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan, dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Begitupun untuk Pengawasan pada SMPI Brawijaya Pungging juga sudah berjalan baik, dari kegiatan yang perlu di awasi dalam kegiatan pembiayaan, kordinasi antara pihak sekolah dan tim pengawas pemerintah daerah.

Kata kunci: Manajemen Pembiayaan, Pendidikan

Abstract

This study aims to identify the Impelentasi of Education Financing Management at SMPI Brawijaya Pungging Mojokerto. This type of research is qualitative research using data analysis methods and interviews. From the results of the study it was obtained that The implementation of Education Financing Management at SMPI Brawijaya Pungging has gone very well, starting from the stage of the principal giving directions before carrying out duties, respecting the opinions of subordinates in this case educators and education staff, and involving educators and education personnel in the preparation of the School Budget Plan (RAPBS). Likewise, supervision at SMPI Brawijaya Pungging has also been going well, from activities that need to be supervised in financing activities, coordination between the school and the local government supervisory team.

Keywords: Financing Management, Education

PENDAHULUAN

dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, pengelola madrasah dan oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah penyediaan sarana prasarana, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran maupun dari segi pembiayaan untuk pemerataan dan peningkatan mutu

pendidikan (Astawa 2017). Biaya pendidikan sebagai faktor utama yang turut menunjang proses pendidikan dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu aspek yang harus terpenuhi adalah persoalan anggaran atau pembiayaan pendidikan tersebut, hal ini perlu dukungan dana yang cukup memadai sehingga pendidikan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan (Sudarmono, Hasibuan, and Us 2021). Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam keberlangsungan pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif sehingga membuat seluruh komponen lembaga pendidikan tersebut bersinergi dan memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan (Arifudin et al. 2021).

Manajemen pembiayaan pendidikan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi- fungsi keuangan. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang berdiri terdiri dari tindakan- tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggantian, dan pengawasan yang dilakukan untuk manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak jauh menyimpang dari konsep, dan sesuai dengan objek yang ditangani serta tempat lembaga sekolah itu berada. Manajemen yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi disebut manajemen yang fleksibel (Warisno and Hidayah 2021). Artinya manajemen dalam lembaga tersebut tidak kaku, dapat berlangsung dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas – tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan dalam lembaga pendidikan (Murtafiah 2022).

Lembaga pendidikan dapat dikatakan juga sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi (Abidin 2017). Biaya pendidikan sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi semua pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait di dalamnya, seperti yang diungkapkan oleh Jhones (2007:20) yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Dalam Manajemen pembiayaan pendidikan dinamika laju perkembangan pendidikan Nasional yang terus berkompetisi dengan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun kelompok tertentu menjadikan usaha pembaharuan manajemen khususnya mengenai manajemen pembiayaan antara yang satu dengan yang lainnya kadang berbeda cara dan karakter dalam mengembangkan dirinya sendiri (Rustiawan 2015). Hal ini memang lumrah karena kondisi lembaga berbeda- beda. Pembiayaan pendidikan harus mengacu pada prinsip

transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan kegiatannya saja, akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Segala hal yang menyangkut tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran biaya dapat dijelaskan secara mendetail lewat laporan yang dibuat. Walaupun memang 4 dikeluarkan untuk pelaksanaan sebuah program, harus jelas program yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan perlu dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk tersalurnya anggaran yang diterima pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika memang tidak, maka harus segera ditindak lanjuti untuk mencari alternatif jalan keluar yang baik. Dengan adanya asas transparansi biaya pada pembiayaan pendidikan dapat mengantisipasi segala anggapan yang negative dari berbagai pihak. Pengeluaran dan pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang negatif dari berbagai pihak dikarenakan tidak ada transparansi dalam pertanggungjawaban segala anggaran yang telah digunakan. Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya ditanggulangi dengan kepala tata usaha. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan harus mempunyai dampak kemajuan dalam bidang pendidikan. Baik dalam bentuk pengeluaran berupa uang maupun barang mempunyai dampak signifikan dalam pembangunan bidang pendidikan. Dalam hal menarik, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi biaya yang ada, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dibuktikan dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang jelas, dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan. Segala pengeluaran yang dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan Sekolah (RAPBS). Segala pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang maupun barang harus jelas runtutannya tertulis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Berdasarkan penjelasan diatas penulis bermaksud meneliti lebih dalam tentang pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan di SMPI Brawijaya Pungging yang mana lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan Sekolah Menengah yang berada dilingkungan pesantren. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis karena pada umumnya lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pesantren dikelola oleh yayasan pesantren sendiri. Oleh sebab itu penulis memberikan penelitian ini dengan judul “Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMP-I Brawijaya Pungging Mojokerto”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan hasil pertimbangan bahwa dengan jenis dan pendekatan penelitian ini dapat membantu untuk mendapatkan informasi dan atau data yang diperlukan peneliti untuk mendeskripsikan kejadian sosial yang lebih spesifik. penelitian ini informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan cara snow ball yaitu dengan menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian

Dalam penelitian ini penulis membedakan informasi penelitian menjadi: Informasi kunci: 1. Kepala Sekolah 2. Tata Usaha Informan Pendukung: 3. Guru 4. Komite Sekolah. Prosedur Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Rulam Ahmadi, yaitu menggunakan data reduction, data display, dan conclusions. Metode ini adalah model analisis data kualitatif yang bersifat interaktif, karena metode ini memberikan rangkaian yang saling berhubungan antara tahapan demi tahapan yang dilakukan pada saat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari kepala sekolah, tata usaha, dan 2 orang guru hasil wawancara yang dilakukan di SMPI Brawijaya Pungging, kemudian ditindaklanjuti dengan mengaitkan pada teori yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sumber biaya yang telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi dan gambaran masing-masing aspek yang diteliti berdasarkan dari perolehan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SMPI Brawijaya Pungging.

1. Perencanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMPI Brawijaya Pungging Manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan baik dan dengan teliti. Hal ini dikarenakan menghindari adanya pemborosan dalam pengeluaran anggaran yang dilakukan. Dilain sisi, dalam hal penganggaran ada dua bagian pokok yang harus diperhatikan yaitu, pendapatan dan pengeluaran. Seperti yang diungkapkan Mulyasa (2007) : “ ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran”.⁵² Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara dapat diperoleh temuan penelitian bahwa manajemen pembiayaan pendidikan dalam penganggaran memiliki dua kegiatan pokok yang harus di rencanakan, yaitu bagaimana dana diperoleh dan dikeluarkan untuk

apa dana tersebut. Kaitannya dalam penganggaran disekolah yaitu menggunakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau yang biasa disebut sebagai (RAPBS). Dari RAPBS akan dapat di taksir pendapatan dana yang akan diperoleh dari berbagai pihak. Selain itu, dapat di taksir dana tersebut digunakan untuk hal apa saja. Tentunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. SMPI Brawijaya Pungging memiliki Rencana Anggaran yang jelas, baik dalam hal dana yang diperoleh ataupun pengalokasian biaya tersebut. Perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian membuktikan bahwa segala pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan sudah tertuang sumuanya pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMPI Brawijaya Pungging. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai fungsi sebagai pimpinan yang mengatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama dalam hal mengelola pembiayaan di sekolah. Seperti pendapat Stoner (1982) yaitu : “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan” Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara dapat yang kemudian diperoleh temuan penelitian bahwa kepala sekolah selaku sebagai seorang manajer/pimpinan yang terdapat pada organisasi pendidikan yaitu sekolah harus mendayagunakan atau dengan kata lain melibatkan para anggota dalam pelaksanaan pembiayaan di sekolah, yang dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelummelaksanakan tugasnya, kepala sekolah harus memberikan arahan kepada pendidik ataupun tenaga kependidikan sebelum melaksanakan tugas yang akan dilakukan. Pada SMPI Brawijaya Pungging kepala sekolah sudah memberikan arahan kepada bawahannya sebelum melaksanakan tugas, hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari pihak tata usaha dan dewan guru yang terdapat di SMPI Brawijaya Pungging. Dengan kata lain, kepala sekolah SMPI Brawijaya Pungging telah memberikan arahan pada bawahannya dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sebelum melaksanakan tugas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu kepala sekolah selaku seorang manajer berperan juga sebagai seorang motivator. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa seorang kepala sekolah harus dapat mengendalikan dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Saran ataupun kritik yang ada harus dapat diterima yang kemudian di tindaklanjuti dengan menganalisa untuk

kemudian perlu dipergunakan atau tidak pada saat nantinya. Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan harus dimulai dengan sikap demokratis dari pimpinan yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Perlu dipikirkan, dalam membina disiplin pendidik dan tenaga kependidikan kepala sekolah harus berasaskan pondasi dari prinsip demokratis, yaitu dari, oleh, dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Pada SMPI Brawijaya Pungging kepala sekolah sudah menghargai pendapat bawahan dalam hal perencanaan pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil wawancara penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa kepala sekolah SMPI Brawijaya Pungging sudah menghargai pendapat bawahan, yang dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu : “Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya (1) Kepala Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) Orang Tua murid dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas pendidikan Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat ”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus melibatkan beberapa komponen, yakni pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pada SMPI Brawijaya Pungging dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah melibatkan komponen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan baik oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dua dewan guru di SMPI Brawijaya Pungging. Kegiatan penyusunan RAPBS dilakukan sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan, pada awal tahun ajaran. Dengan melibatkan tata usaha, dewan guru, dan masyarakat yang ditunjuk sebagai pihak komite sekolah. Namun perwakilan pemerintah belum berantusias hadir dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMPI Brawijaya Pungging. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan bagi pihak pemerintah yang tidak dapat menghadiri dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pada SMPI Brawijaya Pungging. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan pada gambar dibawah ini : Pelaksanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMPI Brawijaya Pungging Pelaksanaan pembiayaan sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sudah direncanakan sejak awal, yang dalam hal ini tercantum pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(RAPBS). Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah terencana biaya yang akan dialokasikan untuk hal apa saja, tentunya untuk proses pelaksanaan belajar mengajar yang berjalan di sekolah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penganggaran mempunyai dua kegiatan inti, yaitu alur masuknya dana dan pelaksanaan dana yang telah diperoleh. Pada SMPI Brawijaya Pungging pelaksanaan pembiayaan sudah mengacu pada standarisasi yang ditetapkan, yang tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMPI Brawijaya Pungging. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan jawaban hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak sekolah SMPI Brawijaya Pungging. Empat dari jawaban yang diterima mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah, yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu pimpinan sekolah yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu : “Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang harus bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu kepala sekolah Pada SMPI Brawijaya Pungging yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian yang diperoleh dari kepala sekolah, tata usaha, dan dua orang guru SMPI Brawijaya Pungging. Dengan kata lain pihak SMPI Brawijaya Pungging sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal penanggung jawab atas tindakan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Anggaran yang dikeluarkan semata- mata untuk pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standarisasi yang ada. Baik dari pemerintah ataupun dari yayasan penyelenggara pendidikan. Standarisasi format dalam laporan pembiayaan sekolah yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran yang jelas, dirinci melalui data pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan. Seperti standarisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun (2012) yaitu : “RAPBM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa laporan yang disajikan harus memuat tentang penerimaan dan penggunaan biaya secara mendetail. SMPI Brawijaya Pungging memiliki

laporan yang jelas, yang dalam hal ini tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru terkait dengan pelaporan pembiayaan pada SMPI Brawijaya Pungging. Pelaporan yang disajikan oleh pihak SMPI Brawijaya Pungging sudah sesuai standarisasi yang ditetapkan, yang dalam hal ini yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pelaporan pembiayaan sekolah disajikan lewat RAPBS yang telah di musyawarahkan pada awal tahun ajaran. Yang melibatkan staf adminisstrasi dan beberapa dewan guru dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMPI Brawijaya Pungging. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Rencana anggaran yang diterima oleh SMPI Brawijaya Pungging bersumber dari empat komponen. a. Rutin, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada jangka waktu satu bulan sekali harus dibayarkan kepada sekolah SMPI Brawijaya Pungging sebesar Rp. 85.000.00,- per siswa selama 12 bulan. b. Awal Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah SMPI Brawijaya Pungging yang dibayarkan pada kurun waktu awal tahun pelajaran saja sebesar Rp. 400.000.00,- per siswa. c. Akhir Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah SMPI Brawijaya Pungging yang dibayarkan pada kurun waktu akhir tahun pelajaran saja sebesar Rp. 500.000.00,- per siswa. d. Bantuan Siswa, biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah SMPI Brawijaya Pungging Cuma-Cuma dalam kurun waktu setiaphari. Tidak dibatasi untuk nominal yang akan diberikan dari siswa pada sekolah SMPI Brawijaya Pungging. Segala anggaran yang diterima oleh pihak SMPI Brawijaya Pungging bersumber dari orang tua siswa dan dari pihak yayasan. Belum adanya campur tangan pemerintah dalam penerimaan anggaran dalam membantu proses pendidikan yang berjalan di SMPI Brawijaya Pungging. Anggaran yang telah diperoleh oleh pihak SMPI Brawijaya baik dari orang tua siswa ataupun dari yayasan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan. Yaitu : 1. Gaji Upah Pegawai Gaji upah pegawai yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang setelah selesai melaksanakan kewajiban. Diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya, untuk menunjang proses pendidikan. Yang jumlahnya yaitu Rp. 16.800.000,- per bulan. 2. Gaji Struktural Gaji struktural yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, hanya yang terkait dalam struktural/jabatan disekolah. Gaji struktural diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya, untuk menunjang proses pendidikan. Contohnya kepala sekolah. Yang jumlahnya yaitu Rp.

2.300.000,- per bulan. 3. Transport Transport yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, untuk kegiatan tranfortasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan yang berjalan disekolah. Upah transport Diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya pada pendidik ataupun tenaga kependidikan. Yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per bulan. 4. Barang Keperluan Kantor Barang keperluan kantor yaitu keperluan yang dibutuhkan sekolah untuk segala hal yang menyangkut pendataan sekolah. Diperuntukan menunjang segala proses pendidikan yang berjalan disekolah. Barang keperluan kantor atau ATK Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap bulannya. Yang jumlahnya yaitu Rp. 1.700.000,- per bulan. 5. Kurikulum Kebutuhan yang dikeluarkan dalam kegiatan proses evaluasi peserta didik, untuk menilai sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menyangkut evaluasi peserta didik dalam hal ini yaitu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Nasional (UN). Kegiatan penilaian peserta didik Dibutuhkan dalam kurun waktu yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dan mengacu pada ketentuan pemerintah. Yang jumlahnya yaitu Rp. 38.200.000.00,- per tahun ajaran. 6. Kegiatan Kesiswaan Kegiatan siswa anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas peserta didik yang dalam hal ini yaitu siswa. Kegiatan yang dalam hal ini yaitu kegiatan ekstra kurikuler. Seperti pramuka dan lain sebagainya. Pengeluaran anggaran dalam bentuk kegiatan kesiswaan Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap bulannya untuk pengalokasian anggaran sekolah, yang jumlahnya yaitu Rp. 4.580.000,- per tahunajaran. 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah, yang dalam hal ini yaitu pemeliharaan gedung sekolah. Seperti perbaikan atap yang bocor, perawatan WC sekolah dan lain sebagainya. Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu 6.800.000,- per tahun ajaran. 8. Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah yang dalam hal ini yaitu pemeliharaan Lab IPA dan Lab computer. Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu 2.400.000,- per tahun ajaran. Langganan Daya/Jasa Langganan Daya/Jasa yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran daya/jasa yang dibutuhkan sekolah. Seperti perbaikan listrik, perbaikan komputer, dan lain sebagainya.

Pengalokasian anggaran untuk Daya/Jasa Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per tahun ajaran. Pengalokasian anggaran pada suatu sekolah atau madrasah salah satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Karena salah satu asupan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik yaitu melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pengalokasian anggaran dalam kegiatan belajar mengajar ditegaskan oleh SKB Mendikbud dan Menkeu No.0585/K/1997 dan No. 590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-09-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi : “Pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa salah satu pengalokasan anggaran harus ditunjukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dana yang telah diperoleh oleh SMPI Brawijaya Pungging dari berbagai pihak salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak SMPI Brawijaya Pungging. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan bahwa pengalokasian anggaran sudah dialokasikan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar, namun belummencapai hasil yang maksimal dikarenakan biaya yang memadai yang diterima oleh pihak SMPI Brawijaya Pungging. Dalam proses pengalokasian anggaran yang harus diperhatikan adalah untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pegalokasian anggaran harus disalurkan pada bentuk pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan. Dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pada SMPI Brawijaya Pungging pengalokasian anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang di dapat dari kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru SMPI Brawijaya Pungging. Pengalokasian anggaran pada SMPI Brawijaya Pungging sudah mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pengawasan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMPI Brawijaya Pungging Pada dasarnya konsep dasar pengawasan anggaran yaitu untuk mengukur,

membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Artinya rencana anggaran yang telah ditetapkan pada awalnya sesuai atau tidak dengan pengalokasian anggaran yang dikeluarkan. Seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2006) yaitu : “Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pengawasan dilakukan untuk menilai efektif atau tidaknya dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan. Artinya yang perlu diawasi dalam hal ini yaitu lewat pembukuan yang jelas. Mulai dari masuknya biaya sampai pada tahap pengeluaran yang dilakukan harus benar-benar tepat dengan sasaran yang telah direncanakan pada awalnya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada SMPI Brawijaya Pungging dalam hal pembiayaan yaitu melalui pengawasan terhadap pembukuan yang dibuat. Pembukuan anggaran yang terdapat di sekolah sudah memenuhi standar, baik dalam pemasukan biaya ataupun pengeluaran anggaran yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru terkait tentang pengawasan dalam hal pembiayaan. Dari hasil perolehan jawaban bahwa kegiatan pengawasan dalam hal pembiayaan lebih ditekankan pada pembukuan yang jelas, mulai dari pemasukan biaya yang telah diperoleh ataupun pengalokasian anggarannya. Setiap sekolah memiliki tim pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh E. Mulayasa (2009) yaitu : “Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan Bawasda ”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa setiap sekolah mempunyai tim pengawas untuk melakukan kegiatan pengawasan di sekolah. Pada SMPI Brawijaya Pungging tim pengawas yang di tugaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan di SMPI Brawijaya Pungging. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dengan kepala sekolah, tata usaha dan dewan guru. Dari perolehan jawaban menyatakan bahwa tim pengawas pemerintah daerah selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah ataupun pada pihak sekolah ketika akan melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dalam tiga tahap, awal, berbarengan dengan kegiatan, dan akhir. Seperti yang ditegaskan oleh T Hani Handoko (2002) yaitu : “pengawasan

pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik ”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan pada tahap awal kegiatan, perbarengan dengan kegiatan, dan akhir dari kegiatan yang dilaksanakan. Pada SMPI Brawijaya Pungging tidak menentu kapan pelaksanaankegiatan yang dilakukan tim pengawas pemerintha daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian yang dilakukan penulis pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru. Perolehan hasil jawaban menyatakan bahwa tim pengawas pemerintah daerah tidak menentu dalam melakukan tindak lanjut kegiatan pengawasan di SMPI Brawijaya Pungging. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan terkhusus dalam hal pembiayaan pendidikan. Seperti yang di bahas sebelumnya, bahwa kegiatan pengawasan baiknya memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Tujuannya agar dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas pemerintah daerah belum memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan perolehanawaban hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru yang menyatakan bahwa tim pengawas daerah tidak dilakukan secara berkala dan tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat menghambat tujuan yang telah direncanakan pada awalnya, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan.

4. Sumber Pembiayaan di SMPI Brawijaya Pungging Perolehan sumber dana bagi lembaga pendidikan dapat dikategorikan pada tiga jenis, pemerintah, dari masyarakat, dan dari orang tua siswa. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2006) yaitu : “Sumber penerimaan terdiri dari pemerintah pusat (APBN), peerintah daerah (APBD), orang tua murid, dan masyarakat ”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh oleh lembaga pendidikan bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pada SMPI Brawijaya Pungging sumber pembiayaan yang diperoleh hanya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian pada kepala sekolah, tata usaha dan dewan guru yang menyatakan sumber pembiayaan yang diperoleh oleh SMPI Brawijaya Pungging hanya sebatas dari orang tua siswa dan masyarakat. Dalam hal ini, belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal bantuan operasional untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang terdapat pada

SMPI Brawijaya Pungging. Tentunya dalam hal ini dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar yang terdapat di sekolah. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, sumber pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal bantuan operasional yang diberikan, untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMPI Brawijaya Pungging. Khususnya program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru SMPI Brawijaya Pungging. Hasil perolehan jawaban menyatakan bahwa belum adanya program pemerintah yang dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional Sekolah atau biasadi singkat sebagai (BOS). Dengan tidak adanya Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh pemerintah, tentunya mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di SMPI Brawijaya Pungging. Karena segala hal yang menyangkut dengan kegiatan terkhusus kegiatan pendidikan tidak lepas dari yang namanya biaya. Dalam hal pengalokasian/pelaksanaan anggaran, hanya kepala sekolah yang berhak mengatur alokasi anggaran disalurkan dalam bentuk apa saja. Tentunya untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan yang berjalan di sekolah. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa kepala sekolah sebagai manajer dapat berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator. Seperti yang di tegaskan oleh E Mulyasa (2007) yaitu : “ Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan ”. Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal pengalokasian sumber dana yang terlibat hanya pimpinan yang dalam hal ini ialah kepala sekolah dan yang diberi wewenang olehnya. Pada SMPI Brawijaya Pungging pengalokasian anggaran tidak melibatkan dewan guru, dikarenakan guru tidak ada yang diberi wewenang oleh kepala sekolah untuk berkecimpung dalam pengalokasian anggaran. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban wawancara penelitian yang menyatakan tidak adanya keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh. Dewan guru sudah memilikitanggungjawab yang lebih penting yaitu mendidik peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) didalam kelas. dalam pengalokasian anggaran harus sesuai dengan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah. Seperti yang telah di bahas sebelumnya, bahwa segala pengalokasian anggaran harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada awalnya yaitu Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pengalokasian anggaran yang terdapat pada SMPI Brawijaya Pungging sudah sesuai dengan perencanaan pada awal pembuatannya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian yang dilakukan pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru SMPI Brawijaya Pungging. Perolehan hasil jawaban menyatakan bahwa pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel (RAPBS) SMPI Brawijaya Pungging. Sebagaimana yang telah dilihat dari hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dari pihak SMPI Brawijaya Pungging Karang Bahagia yaitu Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Dewan Guru sudah berjalan secara efektif namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dari perolehan hasil jawaban yang menyatakan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menyatakan sudah berjalan, akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Dari perolehan hasil jawaban penelitian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Manajemen Pembiayaan di SMPI Brawijaya Punggingmulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua berjalan secara baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Dikarenakan kurang perhatiannya dari berbagai pihak terkhusus dari pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, pembiayaan pada dasarnya harus dikelola secara baik melalui fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi dalam penganggaran. Tujuannya agar tujuan pendidikan yang di cita-citakan dapat tercapai, yaitu tujuan yang berkualitas Kepala sekolah selaku seorang pemimpin yang memimpin di sekolah harus mampu mengembangkan sumber daya dan mengembangkan sejumlah alternatif khususnya dalam penganggaran, agar segala biaya yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pemborosan anggaran yang dikeluarkan. Karena kepala sekolah merupakan penanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yang akan dialokasikan pada kegiatan pendidikan

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil evaluasi dan hasil pembahasan, selanjutnya dapat di tarik kesimpulan pada semua tahapan evaluasi yang meliputi evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil untuk penyelenggaraan Program *full day* di

SDIT Al Ummah Jombang.

Pada tahapan konteks semua aspek evaluasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, pada tahapan input sebagian sudah mencapai kriteria dan sebagian lain belum tercapai, pada tahapan proses sebagian sudah mencapai kriteria dan sebagian lain ada yang belum mencapai kriteria, pada tahapan hasil, semua kriteria sudah mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan efektifitas penyelenggaraan program full day di SDIT Al Ummah Jombang pada setiap tahapan evaluasi sudah berjalan dengan baik bisa terlihat dari hasil pendidikan karakter yang berdampak positif pada aktifitas siswa, walau ada beberapa yang harus ditingkatkan dalam hal manajemen pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah*(Bandung: Pustaka Educa,2010)
- Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008)
- E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007),
- E Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005)
- Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)
- Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup, 2010)
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),